

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 3



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Dorong Heru Cabut Pergub Anies

Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) warisan Anies Baswedan.

Regulasi yang dimaksud adalah Pergub Nomor 63 tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahril mengatakan, pemerintah daerah harus mengembalikan pengelolaan TIM dari Jakpro ke Dinas Kebudayaan.

Dia menyebut, Jakpro tidak memiliki kompetensi untuk mengelola TIM dengan kaidah-kaidah kebudayaan sehingga perseroan lebih cenderung mengejar profit.

"Jakpro itu kan perusahaan, fokus dia nyari keuntungan jadi dia ngerti apa soal kebudayaan. Bikin ITF, bikin MRT dan lain-lain itu oke, tapi kalau untuk membina ini (TIM) jangan diserahkan sama Jakpro," kata Syahril saat rapat kerja dengan berbagai OPD pada Senin (10/4/2023).

Syahril mengatakan, pemerintah daerah sebetulnya dapat menarik Pergub tersebut yang menjadi dasar Jakpro merevitalisasi hingga mengelola TIM. Hal ini berkaca bahwa

pemerintah daerah dapat menarik dan merevisi produk hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah (Perda).

"Itu dasarnya Pergub? Pergub kan gampang ditarik lagi. Perda saja masih bisa kita batalkan, kita tarik lagi kalau mau disempurnakan lagi. Jadi, kalau cuma Pergub tarik saja," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Syahril lalu mengusulkan kepada pimpinan komisi agar memasukan usulan itu ke dalam rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf berjanji akan memasukan aspirasi itu ke dalam rekomendasi komisi. "Ini saya masukan ke rekomendasi ya," ucap Yusuf.

Menurutnya, TIM harus dikelola Dinas Kebudayaan agar kehadirannya yang ditujukan untuk pembinaan kebudayaan di Jakarta bisa tepat sasaran. Jika dikelola Jakpro, pengelolaan TIM akan terlalu komersial sehingga harga sewanya tinggi yang berdampak pada minimnya kegiatan kebudayaan.

"Jangan mengkomersilkan sesuatu yang tidak harus dikomersilkan, kalau memang dalam tarif itu ada event-event yang sifatnya internasional dan persiapannya juga harus mengeluarkan biaya, boleh dikenakan tarif tapi jangan dipukul rata untuk kegiatan seniman atau kebudayaan Jakarta," jelasnya. (faf)



Dok DPRD DKI Jakarta